

**MANAJEMEN KEUANGAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM
MENGEMBANGKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI MI NURUL
HUDA NAHDLATUL WATHAN GEGURUN LOMBOK TIMUR**



Oleh: Muhammad Zaenul Lael, S.Pd.

NIM: 23204092040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

Diajukan kepada Program Magister (S2)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan
Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

**YOGYAKARTA
2025**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-108/Un.02/DT/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : MANAJEMEN KEUANGAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM MENGELOLA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI MI NURUL HUDA NAHDLATUL WATHAN GEGURUN LOMBOK TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZAENUL LAEL, S. Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 23204092040
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Sembodo Andi Widodo, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6941b997078cbf



Pengaji I

Prof. Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
SIGNED

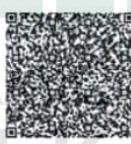
Valid ID: 6964893651a42



Pengaji II

Dr. Shalch, S.Ag., M.Pd., CM., CRMP.
SIGNED

Valid ID: 69546d3ad77e9



Yogyakarta, 05 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 696470f70a8cfc

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul

MANAJEMEN KEUANGAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM
MENGEMBANGKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI MI NURUL
HUDA NAHDLATUL WATHAN GEGURUN LOMBOK TIMUR

Nama : Muhammad Zaenul Lael
NIM : 23204092040
Program Studi : MPI
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam

Telah disetujui tim penguji untuk munaqosyah

Ketua/Pembimbing : ()
Sekertaris/Penguji I : ()
Penguji II : ()

Diuji di Yogyakarta pada Tanggal

Tanggal : Jum'at
Pukul : 08:00 s/d 09:00 WIB
Hasil : 93 (A-)
IPK : 3,95

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Zainul Lael, S.Pd.
NIM : 23204092040
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir (tesis) dengan judul "*Manajemen Keuangan Berbasis Masyarakat dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam di MI Nurul Huda Nahdlatul Wathan Gegurun Lombok Timur*" merupakan karya dan penulisan saya sendiri bukan plagiasi dari hasil orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 04 desember 2025
Yang menyatakan



Muhammad zaenul lael, S.Pd.
NIM. 23204092040

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zaenul Lael, S.Pd
NIM : 23204092040
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir (tesis) dengan judul "*Manajemen Keuangan Berbasis Masyarakat dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam di MI Nurul Huda Nahdlatul Wathan Gegurun Lombok Timur*" bebas dari plagiasi dan sudah memenuhi standar dari program studi, jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 desember 2025
Yang menyatakan



Muhammad zaenul lael, S.Pd.
NIM. 23204092040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum warohmatullahhi wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koresksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

MANAJEMEN KEUANGAN BERBASIS MASAYARAKAT DALAM MENGEMBANGKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI MI NURUL HUDA NAHDLATUL WATHAN GEGURUN LOMBOK TIMUR

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Muhammad Zaenul Lael, S.Pd
NIM	:	23204092040
Fakultas	:	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi	:	Magister Manajemen Pendidikan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd).

Wassalamualaikum warohmatullahhi wabarakatuh.

Yogyakarta, 06 November 2025
Yang menyatakan,



Prof. Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوْا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa': 58).



PERSEMBAHAN

Tesis ini Penulis Persembahkan untuk

Almamater Tercinta

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



ABSTRAK

Muhammad Zaenul Lael, S.Pd. (23204092040). Manajemen Keuangan Berbasis Masyarakat dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam di MI Nurul Huda Nahdlatul Wathan Gegurun Lombok Timur. Yogyakarta: Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam, khususnya pada aspek pendanaan dan pengelolaan keuangan. Keterbatasan dana dari pemerintah mendorong madrasah untuk berinovasi melalui penerapan manajemen keuangan berbasis masyarakat. MI Nurul Huda Nahdlatul Wathan Gegurun Lombok Timur menjadi contoh lembaga yang berkembang melalui partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan manajemen keuangan berbasis masyarakat yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Informan ditentukan melalui purposive sampling yang meliputi kepala madrasah, guru, tokoh masyarakat, dan komite madrasah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Keabsahan data diuji melalui: (1) kredibilitas (*credibility*) dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan penggunaan bahan referensi; (2) keteralihan (*transferability*) melalui penyajian deskripsi konteks penelitian secara rinci; (3) kebergantungan (*dependability*) melalui audit proses penelitian oleh pembimbing; dan (4) kepastian (*confirmability*) melalui pengecekan hasil penelitian dengan proses yang dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) perencanaan keuangan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah untuk menentukan prioritas kebutuhan dan sumber dana; (2) pengorganisasian keuangan dilaksanakan kolaboratif dengan pembagian peran jelas sehingga tercipta sistem *transparan* dan *akuntabel*; (3) pelaksanaan dilakukan melalui penggalangan dana swadaya masyarakat yang dikelola melalui RAPBM untuk pembangunan sarana prasarana dan peningkatan mutu pendidikan; dan (4) pengawasan dilakukan rutin oleh komite dan tokoh masyarakat melalui rapat evaluasi untuk memastikan penggunaan dana sesuai kesepakatan bersama.

Kata kunci: manajemen keuangan, partisipasi masyarakat, pengembangan lembaga pendidikan Islam, MI Nurul Huda NW Gegurun

ABSTRACT

Muhammad Zaenul Lael, S.Pd. (23204092040). *Community-Based Financial Management in Developing Islamic Educational Institutions at MI Nurul Huda Nahdlatul Wathan Gegurun, East Lombok. Yogyakarta: Master's Program in Islamic Education Management, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic University Sunan Kalijaga, 2025.*

This research is motivated by the importance of community participation in developing Islamic educational institutions, particularly in funding and financial management aspects. Limited government funding encourages madrasahs to innovate through implementing community-based financial management. MI Nurul Huda Nahdlatul Wathan Gegurun, East Lombok, serves as an example of an institution that has developed through active community participation in financial planning, implementation, and monitoring. This research aims to analyze the implementation of community-based financial management, including planning, organizing, actuating, and controlling.

This research employs a qualitative approach with analytical descriptive methods. Informants were determined through purposive sampling, including the madrasah principal, teachers, community leaders, and madrasah committee members. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model. Data validity was tested through: (1) credibility by source triangulation, technique triangulation, prolonged observation, increased persistence, and use of reference materials; (2) transferability through detailed presentation of research context; (3) dependability through research process audits by supervisors; and (4) confirmability through verification of research results with the conducted process.

The research findings show: (1) financial planning is conducted participatively through deliberation to determine priority needs and funding sources; (2) financial organizing is implemented collaboratively with clear role division, creating a transparent and accountable system; (3) implementation is carried out through community self-help fundraising managed through RAPBM for infrastructure development and educational quality improvement; and (4) monitoring is conducted routinely by committee and community leaders through evaluation meetings to ensure fund usage aligns with mutual agreements.

Keywords: financial management, community participation, Islamic educational institution development, MI Nurul Huda NW Gegurun

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan -543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	h\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s\}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d\}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t\}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z\}	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

ج	ditulis	muta'addidah
ڇ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

ڻ	ditulis	hibbah
ڙ	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الْبَرَّ	ditulis	kara>mah alauliya>
----------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

جَلِيلٌ	ditulis	zaka>tul fit}r
---------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

-	fath}ah فَاتِحَة	A
-	kasrah كَسْرَة	I
-	d}amah دَمَاهُ	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif بَا	ditulis ditulis	a> ja>hiliyyah
fathah + ya' mati يَمِيت	ditulis ditulis	a> tansa>
kasrah + ya' mati يَمِيت	ditulis ditulis	i> kari>m
dammah + wawu mati فَرَوْضَة	ditulis ditulis	u> furu>d

F. Vokal Rangkap

fathah + ya mati يَا	ditulis ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati فَلَوْ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
إِنْدَدَاتْ	ditulis	u'iddat
لَائِنْ سِكَارْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

الْقُرْآن	ditulis	alQur'a>n
-----------	---------	-----------

الله	ditulis	alQiyas
------	---------	---------

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya. Serta menghilangkan huruf I (el) nya.

الله	ditulis	alSama'
السم	ditulis	alSyams

- c. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

نَبِيُّ الْفَرْضَا مَلِّي اللَّهِ	ditulis ditulis	z\awi> alfurud} ahl alsunnah
-----------------------------------	-----------------	---------------------------------



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَىٰ آلِهٖ وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tesis ini berjudul “Manajemen Keuangan Berbasis Masyarakat dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam di MI Nurul Huda Nahdlatul Wathan Gegurun Lombok Timur”. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd., selaku dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

3. Dr. Nur Saidah, M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan kepada penulis sehingga proses penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Dr. Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I., selaku sekretaris Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam.
5. Dr. H. Sumedi, M.Ag., selaku dosen penasihat akademik, yang telah memberikan saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan seluruh proses akademik pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam.
6. Prof. Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag., selaku dosen tetap Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus pembimbing Tesis, yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan optimal.
7. Segenap dosen dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, atas bantuan dan layanan yang telah diberikan kepada penulis selama masa studi.
8. Muh. Munir Fauzi, M.Pd.; Uswatun Hasanah, S.Pd.; dan Muh. Anwar Fauzi, S.Kom.; serta seluruh keluarga besar MI Nurul Huda Nahdlatul Wathan Gegurun Lombok Timur yang telah memberikan izin penelitian, dukungan,

- doa, serta dengan sabar dan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta segala kebutuhan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.
 10. Seluruh teman mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam semester genap tahun 2024 atas rasa kekeluargaan dan kebersamaan selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis berdoa dengan sepenuh hati, semoga segala bentuk dukungan, bantuan, dan bimbingan dari seluruh pihak selama masa perkuliahan dapat menjadi amal kebaikan yang diterima oleh Allah Swt., serta mendapatkan ganjaran yang sebaik-baiknya. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, sehingga dengan rendah hati mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 06 November 2025
Penulis,

Muhammad Zaenul Lael, S.Pd
NIM. 23204092040

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kegunaan penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kajian Teori	17
1. Manajemen Keuangan Berbasis Masyarakat.....	17
2. Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat	24
3. Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan lembaga Pendidikan islam.....	34
G. Kerangka Teoritis	41
H. Sistematika Pembahasan.....	42
BAB II METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	44
B. Subjek Penelitian	45
A. Sumber data penelitian.....	45
B. Waktu dan lokasi penelitian.....	47
C. Teknik pengumpulan data.....	47
D. Teknik Analisis Data	51
E. Keabsahan data	54
F. Tahap-Tahap Penelitian	59
BAB III PROFIL MI NURUL HUDA NW GEGURUN	61

A. Sejarah Singkat Madrasah	61
B. Identitas Madrasah.....	62
C. Visi, Misi Dan Tujuan Madrasah.....	63
D. Data Madrasah	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Hasil Penelitian	73
B. Pembahasan	116
C. Keterbatasan Penelitian.....	140
BAB V143 PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	144
C. Kata penutup	145
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN.....	156



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Daftar Subjek Penelitian.....	46
Tabel 2. 2	Indikator Observasi	48
Tabel 2. 3	Indikator kebutuhan data wawancara.....	49
Tabel 2. 4	Daftar Dokumentasi	51
Tabel 3. 1	Daftar Hadir Musyawarah Visi–Misi.....	66
Tabel 3. 2	Data Kepala Madrasah MI Nurul Huda NW Gegurun.....	67
Tabel 3. 3	Data PTK MI Nurul Huda NW Gegurun (2025).....	67
Tabel 3. 4	Daftar Tenaga PBKP MI Nurul Huda NW Gegurun (2025).....	68
Tabel 3. 5	Tenaga TKBP MI Nurul Huda NW Gegurun (2025).....	69
Tabel 3. 6	Data PDTT MI Nurul Huda NW Gegurun (2025).....	69
Tabel 3. 7	Data Prestasi ANKA MI Nurul Huda NW Gegurun (2025)	70
Tabel 3. 8	Profil RK MI Nurul Huda NW Gegurun (2025).....	70
Tabel 3. 9	Profil RLKKM MI Nurul Huda NW Gegurun (2025)	70
Tabel 3.10	Kondisi Sarpras Ideal	71
Tabel 4. 1	Dana Pembangunan MI Nurul Huda NW Gegurun (2015–2022)....	100
Tabel 4. 2	Dampak Strategis Pengelolaan Keuangan Berbasis Masyarakat	118
Tabel 4. 3	Alokasi Dana Fase Membangun Fondasi (2015–2018)	134
Tabel 4. 4	Alokasi Dana Pengembangan Pembelajaran (2019–2021)	135
Tabel 4. 5	Transparansi Penggunaan Dana di MI Nurul Huda NW Gegurun...	137
Tabel 4. 6	Siklus Kepercayaan dalam Transparansi Pengelolaan Dana.....	137
Tabel 4. 7	Indikator Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana	138
Tabel 4. 8	Dampak terhadap Pengembangan Lembaga	140

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Analisis Data Miles, Huberman, dan Saldana	52
Gambar 3. 1	Musyawarah Visi–Misi MI Nurul Huda NW Gegurun Lotim	66
Gambar 4. 1	Musyawarah untuk Pembangunan Madrasah.....	73
Gambar 4. 2	Perencanaan Pembangunan MI Nurul Huda NW Gegurun.....	75
Gambar 4. 3	Wawacara Dengan Muh Anwar Fauzi & H. Fauzuddin.....	76
Gambar 4. 4	Arsip Proses Pencatatan Dana Pembangunan MI Nurul Huda NW Gegurun Lotim	77
Gambar 4. 5	Struktur Kepengurusan Pembagunan Madrasah	79
Gambar 4. 6	Workshop implementasi KM dan pelatihan berbasis digital.....	80
Gambar 4. 7	Program Tahfiz MI Nurul Huda NW Gegurun	81
Gambar 4. 8	(Suber Arsip) Rapat Evaluasi Pembangunan Madrasah.....	84
Gambar 4. 9	Musyarah Pembentukan Kepengurusan Pembangunan.....	85
Gambar 4.10	Wawancara Dengan Guru-guru MI Nurul Huda NW Gegurun	87
Gambar 4.11	Penandatanganana Surat Keputusan Kepala Madrasah tentang Pembentukan tim pengelola keuangan	89
Gambar 4.12	Gotong Royong Masyarakat dusun Gegurun dalam Pembangunan Madrasah	90
Gambar 4.13	Syafari Jumatan Masyarakat Gegurun Untuk Pembangunan Madrasah	95
Gambar 4.14	Surat Edaran Penggalanagan Dana Pembangunan Madrasah	98
Gambar 4.15	Wawancara dengan Guru sekaligus bendahara madrasah.....	105
Gambar 4.16	Partisifasi Masyarakat Dalam Pembangunan MI Nurul Huda NW Gegurun	106
Gambar 4.17	Pembuatan Buku Kas dan Input Pengeluaran/kemasukan Pembangunan Madrasah.....	109
Gambar 4.18	Perpustakaan, Ruang Kelas dan Lapangan MI Nurul Huda NW Gegurun	114

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Padoman wawancara	156
Lampiran 1. 2 Gedung MI Nurul Huda NW Gegurun Tahap Satu	160
Lampiran 1. 3 Kelas Dan Kantor MI Nurul Huda NW Gegurun Tahap Dua ...	160
Lampiran 1. 4 Ruang Lap Komputer MI Nurul Huda NW Gegurun	161
Lampiran 1. 5 Aula MI Nurul Huda NW Gegurun	161



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pendidikan harus senantiasa berkembang dan mampu beradaptasi dengan tantangan seiring perubahan zaman.¹ Sebagai mana tertulis dalam:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri. Tujuannya adalah agar mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.²

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut secara optimal, diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, salah satunya ditunjang oleh kecukupan dana. Namun, ketersediaan dana dalam jumlah besar tidak serta merta menjamin tercapainya mutu pendidikan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, manajemen keuangan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dana secara efektif dan efisien guna mendukung pencapaian tujuan pendidikan.³ Secara umum, manajemen keuangan meliputi

¹ Syahrul Fauzi and Nidaul Fajrin, “Peran Manajemen Pendidikan Islam dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat,” *Heutagogia: Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2022), hlm. 17–32.

² Asep Muljawan, “Model dan Strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam,” *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam Volume 5*, no. 1 (2020), hlm. 51–69.

³ Lidia Olga and Faiq Nurraihan, “Manajemen Finansial dalam Konteks Pendidikan,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Equilibrium* 9, no. 1 (2024), hlm. 11-328.

empat aspek utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan agar tujuan lembaga dapat tercapai dengan cara yang efisien dan efektif. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, pengelolaan keuangan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, yang menjadikan proses lebih kompleks.⁴

Dengan pendekatan tersebut, tidak hanya memperkuat integritas lembaga, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan yang diterapkan.⁵ Tujuannya adalah untuk membangun sistem keuangan yang stabil, adil, dan berkelanjutan, yang sesuai dengan nilai Islam serta prinsip keuangan Islam. Teori ini diterapkan oleh lembaga pendidikan Islam dalam mengelola keuangan sekolah, di mana mutu lembaga dapat tercermin dari pengelolaannya.⁶

Salah satu sumber daya yang perlu dikelola secara efektif dalam lembaga pendidikan adalah aspek keuangan. Dalam konteks ini keuangan menjadi sumber dana yang sangat penting bagi sekolah, digunakan untuk melengkapi sebagai sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah.⁷ Selanjutnya, E. Mulyasa mengemukakan bahwa manajemen keuangan di sekolah merupakan bagian dari pembiayaan pendidikan yang menuntut sekolah untuk melakukan perencanaan,

⁴ M. Ridwan Tasa, “Manajemen Keuangan Dan Kualitas Pendidikan Islam: Analisis Pada Lembaga Pendidikan Islam Swasta,” *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 9, no. 3 (2022), hlm. 814–32.

⁵ Fathul Maujud Lalu Hamdi Usman, Syaharuddin, “*Jurnal Pendidikan Islam.*,” *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2024): hlm. 128–35.

⁶ Irani Surya Kartini Inaldi and Ida Rindaningsih, “Strategi Menyusun Manajemen Keuangan Dalam Lembaga Pendidikan Islam,” *Jurnal Kependidikan Islam* 14,no.1 (2024), hlm. 11–20,

⁷ Abdul Aziz Dkk, *Manajemen Pendidikan Islam: Filosofi, Konsep Dasar, Dan Implementasi Praktis* (Malang: CV. Pustaka Peradaban, 2023), hlm. 92.

pelaksanaan, evaluasi, serta pertanggungjawaban dana secara efektif dan efisien.⁸

Dalam praktiknya, pelaksanaan manajemen keuangan tersebut berkaitan erat dengan pengelolaan berbagai sumber dana pendidikan. Sumber dana untuk pengembangan dan pembangunan lembaga pendidikan Islam dapat berasal dari berbagai pihak. Secara umum, sekolah swasta lebih banyak mengandalkan pendanaan dari masyarakat, sementara bantuan dari pemerintah relatif terbatas.⁹ Pemerintah daerah sering kali berperan sebagai fasilitator dan pengatur kebijakan pendidikan, meskipun keterlibatannya dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam tetap signifikan melalui berbagai program pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan. Namun demikian, anggaran yang tersedia masih belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia.¹⁰

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pendanaan lembaga pendidikan Islam swasta berperan sangat penting dalam menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam.¹¹ Adapun dukungan yang diberikan dapat berupa pendanaan, tenaga ahli, pemikiran, serta penyediaan sarana dan prasarana. Sesuai yang tertera dalam:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 BAB XV Pasal 54, masyarakat

⁸ Siska Yulia Weni and Isfaiyah, “Manajemen Pembiayaan Pada Lembaga Pendidikan Islam,” *Jurnal Ihsan Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2024), hlm. 27–38.

⁹ Iman Subasman and Faat Nasyiruddin, “Sistem Pendidikan Islam Dalam Membangun Karakter: Evaluasi Program Ajengan Masuk Sekolah Di Pangandaran,” *Journal on Education* 6, no. 4 (2024), hlm. 47–60

¹⁰ Siska Yulia Weni and Isfaiyah, “Manajemen Pembiayaan Pada Lembaga Pendidikan Islam.” hlm. 99.

¹¹ M.Yunus Abu Bakar, Siti Nur Maulidiyah Munandari, and Zainia Zein, “Peran Dan Tanggung Jawab Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam,” *Journal of Student Research* 2, no. 4 (2024), hlm. 01–12.

memiliki peran tertentu dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa: *Pertama*, partisipasi masyarakat dalam pendidikan mencakup peran individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, serta organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pelayanan, dan pengendalian mutu pendidikan. *Kedua*, masyarakat berperan sebagai sumber daya, pelaksana, sekaligus pengguna hasil pendidikan. *Ketiga*, ketentuan mengenai keterlibatan masyarakat diatur dalam ayat 1 dan 2 serta dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.¹²

Dengan demikian melalui peran aktif masyarakat, lembaga pendidikan Islam swasta mampu meningkatkan mutu pendidikannya, menjamin kurikulum yang relevan dengan kebutuhan komunitas, dan menghadirkan lingkungan pembelajaran yang mendukung bagi para siswa.

Untuk mengoptimalkan peran aktif masyarakat tersebut dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, penerapan prinsip-prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan di Indonesia menjadi sangat penting. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, penguatan partisipasi masyarakat, efisiensi, keterarahan, serta pengendalian sesuai dengan rencana program. Transparansi dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, seperti penyajian dokumen anggaran melalui papan pengumuman atau media daring, diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat serta memudahkan akses informasi yang akurat dan memadai bagi seluruh pemangku kepentingan.¹³

Dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dilakukan secara kolaboratif antara pihak sekolah dan komite

¹² Fajri Dwiyama et al., “Manajemen Humas: Membangun Peran Masyarakat Pada Lembaga Pendidikan,” *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2020), hlm. 63–71.

¹³ Yuliana dkk, *Manajemen Pendidikan Islam Di Era Digital* (Sersng-banten: PT Sada Kurnia Pustaka,2023), hlm. 4.

sekolah yang mewakili masyarakat. Pendekatan ini menjamin bahwa kebutuhan serta harapan komunitas dapat tercakup dalam perencanaan keuangan sekolah.¹⁴ Sehingga, dengan demikian pengelolaan dana yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya mengurangi risiko penyalahgunaan dana.

Partisipasi masyarakat dan transparansi merupakan dua prinsip utama dalam pengembangan dan pengelolaan lembaga pendidikan yang efektif. Keterlibatan aktif masyarakat serta keterbukaan informasi memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan bersama. Selain itu, partisipasi tersebut menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap program pendidikan, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan inisiatif pendidikan tersebut, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan inisiatif pendidikan.¹⁵

Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana sekolah dilakukan. Transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan sekolah sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya permasalahan keuangan, seperti penyimpangan dana dan kendala finansial lainnya.¹⁶ Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan membantu menciptakan sistem

¹⁴ Muhajirin, “Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Partisipasi Masyarakat,” *Educational Management*, vol 1, no. 2 (2019), hlm. 71–75.

¹⁵ Paisal Manurung et al., “Keterlibatan Masyarakat Dalam Upaya Membangun Pendidikan Berkelanjutan” 5, no. 5 (2024), hlm. 150-180.

¹⁶ siti Masitho Novita Dan M. Athoiful Fanan, “Manajemen Keuangan Di Madrasah Ibtida’iyah Tarbiyatus Syarifah Sidoarjo,” *Al-Mafazi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol 2, no. 1 (2024), hlm. 37–44.

pendidikan yang lebih transparan, berintegritas, dan berkelanjutan.

Prinsip tersebut tercermin dalam latar belakang berdirinya lembaga pendidikan MI Nurul Huda NW Gegurun Lombok Timur. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, pendirian madrasah ini murni merupakan inisiatif masyarakat setempat yang memiliki keinginan untuk mendirikan sekolah Islam dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa agar menjadi individu yang cerdas, bermoral, dan berakhhlak mulia. Oleh karena itu, hampir seluruh masyarakat, bahkan mendekati 100%, turut berpartisipasi dalam proses pembangunan madrasah, baik dari segi pendanaan, tenaga, maupun pemikiran.¹⁷

Inisiatif pendirian MI Nurul Huda Nahdlatul Wathan Gegurun tersebut tidak terlepas dari peran masyarakat serta dukungan Nahdlatul Wathan sebagai salah satu organisasi Islam besar di Indonesia yang memiliki kontribusi strategis dalam pengembangan pendidikan Islam, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Didirikan pada tahun 1953 oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Masyarakat Nahdlatul Wathan berkontribusi melalui penyelenggaraan pendidikan formal, seperti madrasah dan perguruan tinggi, serta pendidikan nonformal yang berfokus pada pembinaan karakter dan penanaman nilai-nilai keislaman. Dalam perkembangannya, organisasi ini tidak hanya memperkuat identitas keislaman masyarakat, tetapi juga menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme.¹⁸

¹⁷ Obsevasi Awal Pada MI Nurul Huda NW Gegurun Lombok Timur Dengan Bapak Muhamad Awar Fauzi, Pada Tanggal 02 Juli 2025.

¹⁸ Herman Zuhdi, "Perkembangan Nahdlatul Wathan: Sejarah, Struktur, Dan Dampaknya Bagi Pendidikan Islam Indonesia," *Nagri Pustaka: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sejarah, Dan Budaya* 2, no. 2 (2024), hlm. 170–176.

Dalam konteks pengembangan pendidikan Islam di Dusun Gegurun, masyarakat bekerja sama secara kolektif dalam mendirikan MI Nurul Huda NW Gegurun. Mayoritas masyarakat Dusun Gegurun merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Wathan dan memiliki kesamaan visi dalam penguatan pendidikan keislaman. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk mentransformasikan lembaga pendidikan diniyah menjadi Madrasah Ibtidaiyah formal.

Proses pendirian madrasah ini dilaksanakan melalui partisipasi aktif masyarakat secara gotong royong, baik dalam bentuk kontribusi pendanaan, tenaga, maupun pemikiran. Berdasarkan hasil pengamatan awal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji proses pengembangan dan pembangunan MI Nurul Huda Nahdlatul Wathan Gegurun, khususnya terkait pengelolaan keuangan, pembangunan partisipatif, serta aspek pendukung lainnya. Ketertarikan ini didasarkan pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas manajemen keuangan berbasis masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang melengkapi khazanah literatur mengenai manajemen keuangan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan keuangan berbasis masyarakat dalam mendukung pembangunan Madrasah Ibtidaiyah di Dusun Gegurun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan (*planning*) manajemen keuangan berbasis masyarakat dalam mendukung pengembangan MI Nurul Huda NW Gegurun?
2. Bagaimana Pengorganisasian (*organizing*) masyarakat dalam pengelolaan keuangan untuk pembangunan lembaga pendidikan Islam di MI Nurul Huda NW Gegurun?
3. Bagaimana implementasi (*actuating*) manajemen keuangan yang dilakukan masyarakat dalam proses pengembangan MI Nurul Huda NW Gegurun?
4. Bagaimana pengawasan dan evaluasi (*controlling*) terhadap penggunaan keuangan berbasis masyarakat dalam pengembangan MI Nurul Huda NW Gegurun?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mendeskripsikan perencanaan (*planning*) manajemen keuangan berbasis masyarakat dalam menunjang pengembangan MI Nurul Huda NW Gegurun.
- b. Untuk menganalisis Pengorganisasian (*organizing*) serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam di MI Nurul Huda NW Gegurun.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan (*actuating*) dari manajemen keuangan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam pengembangan MI Nurul Huda NW Gegurun.

- d. Untuk mengevaluasi pengawasan (controlling) terhadap penggunaan dan efektivitas keuangan berbasis masyarakat dalam proses pengembangan MI Nurul Huda NW Gegurun.

D. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan dan wawasan baru bagi masyarakat serta dunia pendidikan secara umum, khususnya mengenai manajemen keuangan berbasis masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam.

b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi masyarakat Dusun Gegurun dalam membangun atau mengembangkan lembaga pendidikan Islam.
- 2) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan mengenai manajemen keuangan berbasis masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam.
- 3) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang berguna dan bisa menjadi bahan referensi bagi masyarakat secara umum dalam upaya mengembangkan lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan *literatur review* yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan yang serupa dengan topik yang dibahas.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Guruh Sri Susanti dengan judul “Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MI Al Hidayah Puri Pati”. Penelitian ini berfokus pada penerapan manajemen pendidikan berbasis masyarakat serta pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan di MI Al Hidayah Puri Pati. Kajian tersebut menyoroti peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas lembaga. Berdasarkan prinsip pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat mampu meningkatkan minat warga dalam menyekolahkan anaknya, memperbaiki prestasi siswa, serta menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing. Dengan demikian, manajemen pendidikan berbasis masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.¹⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kadar dengan judul “*Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Masyarakat (Studi pada TK/RA di Kabupaten Kebumen)*” berfokus pada fungsi dan implementasi manajemen

¹⁹ Guruh Sri Susanti, “Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Mi Al Hidayah Puri Pati” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), hlm. 120-140.

lembaga pendidikan TK/RA yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survei lapangan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner yang divalidasi dengan triangulasi data antara peneliti, praktisi, dan responden. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan memadukan kajian teoretis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendidikan berbasis masyarakat dilaksanakan melalui pengambilan keputusan bersama secara demokratis, keterbukaan informasi, serta pemberdayaan masyarakat pada setiap tahapan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga tercipta lembaga pendidikan yang profesional, mandiri, dan berdaya saing.²⁰

Ketiga, penelitian Putra Sari berjudul “*Manajemen Pendidikan Masyarakat Berbasis Nilai pada Lembaga Pendidikan Nonformal ‘Gelar Hidup’ di Desa Perampuan Lombok Barat, NTB*” berfokus pada penerapan manajemen pendidikan berbasis nilai, termasuk kendala yang dihadapi serta dampak yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik pengelolaan pendidikan berbasis nilai yang diterapkan di tengah lingkungan sosial masyarakat yang relatif kurang kondusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga tersebut menerapkan prinsip *Total Quality Management* (TQM) dengan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada setiap tahapan manajemen, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, serta

²⁰ Kadar, “Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Masyarakat (Studi Pada TK/RA Di Kabupaten Kebumen),” *Disertasi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), hlm. 155-168.

mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam proses pembelajaran. Penerapan pendekatan ini terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran moral, perubahan pola pikir, dan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.²¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dede Setiawan dan kawan-kawan dengan judul “*Pengembangan Sosial dan Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat*” berfokus pada analisis peran pendidikan berbasis masyarakat sebagai bentuk kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat mendorong partisipasi aktif masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal, serta penguatan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lembaga pendidikan. Dalam model ini, pemerintah berperan sebagai mitra dan fasilitator, bukan aktor dominan. Kemitraan tersebut terbukti mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal serta efektif dalam mengatasi permasalahan pendidikan, seperti tingginya angka putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.²²

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fantika Febry Puspitasari dengan judul “*Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi Tafsir Al-Mizan: M. Husain Tabataba'i)*” berfokus pada pengelolaan keuangan lembaga

²¹Putra Sari, “Manajemen Pendidikan Masyarakat Berbasis Nilai Pada Lembaga Pendidikan Nonformal ‘Gelar Hidup’ Di Desa Perampuan Lombok Barat Nusa Tenggara Barat” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 60-80.

²² Dede Setiawan, Sulaiman Abdul Aziz, and Cecep Hilman, “Pengembangan Social Dan Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat,” *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* 2, no. 2 (2022), hlm. 74–84.

pendidikan Islam dengan menekankan integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik manajemen. Penelitian ini mengkaji aspek perencanaan keuangan, penyusunan anggaran, serta sistem akuntansi yang diterapkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan adanya empat aspek utama dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan Islam, yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, perencanaan dan penganggaran yang matang, serta pengawasan, pelaporan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga efektivitas dan keberlangsungan lembaga.²³

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Irani Surya Kartini Inaldil dan Ida Rindaningsih dengan judul “*Strategi Menyusun Manajemen Keuangan dalam Lembaga Pendidikan Islam*” menganalisis strategi manajemen keuangan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan dana bagi keberlangsungan operasional dan peningkatan mutu pendidikan. Strategi yang dikaji meliputi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, penyusunan anggaran berbasis kebutuhan, diversifikasi sumber dana seperti zakat, infak, wakaf, dan hibah, pemanfaatan teknologi keuangan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang memahami syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi tersebut secara konsisten mampu mendukung pengelolaan keuangan

²³ Fantika Febry Puspitasari, Tutik Hamidah, and Aunur Rofiq, “Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi Tafsir Al-Mizan: M. Husain Tabataba’i),” *Al-Idarah : Jurnal Kependidikan Islam* 1>2, no. 1 (2022), hlm. 66–75.

yang tertib, efektif, dan berkelanjutan serta meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam.²⁴

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Adani Asari dan kawan-kawan dengan judul “*Pengembangan Sistem Keuangan Sekolah Berbasis Teknologi untuk Mendukung Transformasi Society 5.0*” membahas pengembangan sistem keuangan sekolah berbasis teknologi sebagai upaya mendukung transformasi menuju Society 5.0, yang menuntut integrasi teknologi informasi dalam tata kelola pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis teknologi memungkinkan penyediaan informasi secara *real-time* melalui pemanfaatan *cloud*, otomatisasi, dan analisis data, sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi ini juga memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data dan penyusunan laporan keuangan, sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di dunia pendidikan.²⁵

Kedelapan, penelitian oleh Aulya Fahma berjudul “*Manajemen Keuangan di Madrasah Aliyah Swasta Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan*” berfokus pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Aliyah mengacu pada anggaran induk pesantren, sementara input data dilakukan melalui aplikasi sesuai standar Kementerian Agama.

²⁴ Inaldi and Rindaningsih, “*Strategi Menyusun Manajemen Keuangan Dalam Lembaga Pendidikan Islam*”, hlm. 70-90.

²⁵ Adani Asri et al., “*Pengembangan Sistem Keuangan Sekolah Berbasis Teknologi Untuk Mendukung Transformasi Society 5.0*,” *Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024), hlm. 21–24.

Pelaksanaan keuangan, khususnya dana BOS, melibatkan kepala madrasah, bendahara, dan kepala tata usaha. Adapun evaluasi keuangan dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan dengan melibatkan pihak internal dan bagian terkait lainnya.²⁶

Kesembilan, penelitian oleh Fatma Sari berjudul “*Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMAN 5 Payakumbuh*” berfokus pada penerapan manajemen keuangan sekolah yang mencakup pengendalian administrasi dan pengelolaan dana. Penelitian ini juga menguraikan prinsip dasar manajemen serta jenis pembiayaan sekolah yang berperan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga pendidikan sangat bergantung pada pengelolaan keuangan yang dilakukan secara serius dan bertanggung jawab sehingga mampu meminimalkan risiko dan meningkatkan mutu pendidikan.²⁷

Kesepuluh, penelitian Ahmad Misbah berjudul “*Model Manajemen Keuangan Syariah di Pesantren: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pendidikan Islam di Era Digital*” berfokus pada analisis model manajemen keuangan digital berbasis syariah untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model ini

²⁶ Auliya Fahma Auliya, Arida Salsabilah, and Muhammad Rizky, “Manajemen Keuangan Di Madrasah Aliyah Swasta Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan,” *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2024), hlm. 37–42.

²⁷ Fatma Sari, Iswantir M, and Susanda Febriani, “Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di SMAN 5 Payakumbuh,” *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)* 2, no. 1 (2023), hlm. 32-231.

meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya administrasi, serta memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat. Integrasi teknologi digital dan nilai syariah juga mengurangi ketergantungan pada donasi eksternal dan mendukung keberlanjutan finansial pesantren jangka panjang.²⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa studi sebelumnya yang sama-sama menitikberatkan pada pengembangan lembaga pendidikan Islam melalui manajemen keuangan berbasis masyarakat. Beberapa penelitian, seperti kajian tentang “*Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MI Al Hidayah Puri Pati*” dan “*Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Masyarakat (Studi pada TK/RA di Kabupaten Kebumen)*”, sama-sama berfokus pada penerapan manajemen berbasis masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun, penelitian pertama menekankan dampak penerapan manajemen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, sedangkan penelitian kedua lebih menitikberatkan pada fungsi dan implementasi manajemen lembaga TK/RA dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, meskipun dukungan pendanaan masyarakat secara berkelanjutan belum sepenuhnya terwujud.

Penelitian lain, seperti “*Pengembangan Sosial dan Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat*”, turut memberikan kontribusi terhadap pengembangan lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menekankan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas

²⁸ Ahmad Misbah, “Model Manajemen Keuangan Syariah Di Pesantren : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pendidikan Islam Di Era Digital,” *Nidhomiyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 05, no. 02 (2024), hlm. 16–84.

serta pemerataan pendidikan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur, sehingga mendukung pengembangan lembaga pendidikan Islam secara menyeluruh.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penekanannya terhadap manajemen keuangan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam melalui perencanaan dan penerapan yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam, transparansi, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan dana dan pembiayaan yang terencana dan terarah, proses peningkatan mutu lembaga pendidikan dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini turut memperkaya khazanah literatur mengenai manajemen keuangan berbasis masyarakat sebagai salah satu indikator penting dalam keberhasilan pengembangan lembaga pendidikan Islam.

F. Kajian Teori

1. Manajemen Keuangan Berbasis Masyarakat

a. Manajemen Keuangan

Sebelum membahas lebih dalam mengenai manajemen keuangan berbasis masyarakat, perlu terlebih dahulu dipahami bahwa istilah "*manajemen keuangan*" terdiri dari dua bagian, yaitu "*manajemen*" dan "*keuangan*". Untuk itu, masing-masing istilah perlu dijelaskan secara terpisah. Secara etimologis, kata "*manajemen*" berasal dari istilah bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengatur. Proses pengaturan ini

dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu dan mengikuti urutan fungsi-fungsi manajemen yang telah ditentukan sebelumnya.

George R. Terry dalam karya yang dikutip oleh Hasibuan menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses tersendiri yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, yang dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif.²⁹ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa manajemen merupakan serangkaian tahapan sistematis yang meliputi proses berpikir dan bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, dengan cara memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia secara optimal.

Manajemen keuangan merupakan suatu rangkaian proses dalam mengelola keuangan yang dilakukan dengan melibatkan dan menggerakkan peran orang lain. Proses ini mencakup tahapan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan.³⁰

Dengan perencanaan keuangan yang tersusun dengan baik akan berdampak positif terhadap proses pelaksanaannya.³¹ Sebab penyusunan keuangan yang bersifat strategis merupakan suatu proses jangka panjang

²⁹ Khoirul Anam, “Manajemen Keuangan Madrasah Yang Bersumber Dari Masyarakat,” *At-Turats Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam* 13, No. 1 (2019), hlm. 57–75.

³⁰ MS Syaifullah, “Manajemen Keuangan Pendidikan,” *Journal Of Pedagogy* 4, No. 1 (2021), hlm. 11–17.

³¹ Yaredi Waruwu Et Al., “Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,” *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 5, No. 3 (2022), 440–50.

yang dirancang untuk menyesuaikan tujuan-tujuan keuangan organisasional secara menyeluruh.³²

Selanjutnya, beberapa ahli mengemukakan pengertian manajemen keuangan sebagai berikut:

- 1) Sartono menjelaskan bahwa manajemen keuangan mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengalokasian dana ke berbagai bentuk investasi secara efektif, serta upaya pengumpulan dana untuk membiayai investasi tersebut dengan cara yang efisien.³³
- 2) Bambang Riyanto, mengungkapkan bahwa manajemen keuangan mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan upaya memperoleh dana dengan biaya serendah mungkin, serta menggunakan secara efisien demi mencapai hasil yang paling menguntungkan bagi lembaga/organisasi.
- 3) James Van Horne, menyatakan bahwa manajemen keuangan mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dana, pembiayaan, dan pengelolaan aset secara menyeluruh.
- 4) K.D. Wilson menjelaskan, bahwa manajemen keuangan berfokus pada proses pengumpulan dana dan penggunaannya secara efektif, dengan tujuan utama memaksimalkan kekayaan pemegang saham.³⁴

³² Zul Fadli et.al, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Padang: CV Gita Lentera, 2025), hlm. 23.

³³ Sopi & Tossy Aryanto, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023), hlm. 129.

³⁴ Samsurijal Hasan et al, *Manajemen Keuangan* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), hlm. 21.

5) Sedangkan Menurut Lawrence J. Gitman dalam Iskandar, menyatakan bahwa *finance can be defined as the art and science of managing money*, keuangan dipahami sebagai seni sekaligus ilmu dalam mengelola uang. Dengan demikian, keuangan dapat dimaknai sebagai suatu disiplin ilmu yang berfokus pada pengelolaan sumber daya finansial dalam sebuah organisasi guna mencapai tujuan serta mendukung pertumbuhan yang diharapkan.

Melalui beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan suatu proses yang mencakup pengelolaan seluruh aspek keuangan dalam organisasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban akhir. Proses ini memiliki peran krusial untuk menjamin bahwa keuangan organisasi dapat dikelola secara tepat dan efisien.³⁵

b. Keuangan berbasis masyarakat

Keuangan berbasis masyarakat (*Community-Based Finance*) adalah sistem keuangan yang dikelola dan dioperasikan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan finansial anggota komunitas, dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat.³⁶ Menurut Ledgerwood keuangan berbasis masyarakat merupakan suatu pendekatan dalam penyediaan layanan keuangan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan

³⁵ Abdul Aziz Dkk, *Manajemen Pendidikan Islam: Filosofi, Konsep Dasar, Dan Implementasi Praktis* (Malang: CV. Pustaka Peradaban, 2022), hlm. 127.

³⁶ Nitin Bhatt and Shui Yan Tang, “Delivering Microfinance in Developing Countries: Controversies and Policy Perspectives,” *Policy Studies Journal* 29, no. 2 (2020), hlm. 319–33.

keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi lokal.³⁷

Sedangkan Menurut Robinson Mendefinisikan keuangan berbasis masyarakat sebagai sistem keuangan yang dikembangkan, dimiliki, dan dioperasikan oleh masyarakat untuk masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota komunitas.³⁸

Keuangan berbasis masyarakat (*community-based Finance*) merupakan sistem pembiayaan yang mengandalkan partisipasi aktif masyarakat dalam mobilisasi, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya keuangan untuk kepentingan bersama.³⁹ Konsep ini menekankan pada prinsip kemandirian finansial melalui gotong royong dan solidaritas sosial yang mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia.⁴⁰

Sistem keuangan berbasis masyarakat memiliki karakteristik utama berupa kedekatan geografis antara pengelola dan pengguna dana, transparansi dalam pengelolaan, serta orientasi pada kesejahteraan kolektif daripada keuntungan individual. Model ini mencakup berbagai bentuk seperti arisan, koperasi simpan pinjam, bank wakaf mikro, dan lembaga keuangan mikro syariah.⁴¹

c. Tujuan dan Konsep Keuangan Berbasis Masyarakat

³⁷ J Ledgerwood, *The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective*. Washington, (DC: World Bank Publications, 2018), hlm. 149.

³⁸ Ibid., hlm. 170.

³⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 156.

⁴⁰ Pauzi Muhammad, “Keadilan Dan Pemerataan Ekonomi Melalui Konsep Baitul Mal Wat Tamwil (BMT),” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020), hlm. 54–60

⁴¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 101.

Tujuan utama keuangan berbasis masyarakat adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama bagi kelompok yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional.⁴² Sistem ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui penyediaan modal usaha, mendorong kemandirian ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan formal yang seringkali memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Keuangan berbasis masyarakat bertujuan mempererat kohesi sosial melalui gotong royong dalam pengelolaan dana, membangun jejaring, serta menumbuhkan kepercayaan antar anggota. Sistem ini juga mendukung pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.⁴³

Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan mendorong keuangan inklusif, yaitu kondisi di mana setiap orang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang aman, mudah dijangkau, dan sesuai kebutuhan, guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Salah satu indikator keadilan dan pemerataan adalah akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.⁴⁴

⁴² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 60.

⁴³ Nurul Huda & Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah “Tinjauan Teoritis Dan Praktis”* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 45.

⁴⁴ Sindi Puspitasari, A. Jajang W Mahri, and Suci Aprilliani Utami, “Indeks Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2020), hlm. 15–31.

Melalui strategi nasional keuangan inklusif, diharapkan tercipta kolaborasi yang baik antar lembaga pemerintah dan para pemangku.⁴⁵ Yang mana para tokoh masyarakat berperan dalam memfasilitasi warga untuk mewujudkan keadilan sosial dan sikap saling menghargai melalui berbagai program pembangunan yang menyentuh seluruh elemen masyarakat secara menyeluruh.⁴⁶ Untuk memahami arah dan tujuan dari pengembangan keuangan inklusif, perlu dipahami secara jelas visi dan misi yang menjadi landasannya. Visi dari pengembangan keuangan inklusif adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan formal dengan pemahaman yang memadai terhadap sistem dan produknya, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.⁴⁷

Dengan demikian, keuangan berbasis masyarakat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan keuangan, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam membangun keadilan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam konteks pengembangan lembaga pendidikan Islam, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan melalui manajemen keuangan yang partisipatif dan transparan, di mana masyarakat turut serta dalam perencanaan, pendanaan, hingga

⁴⁵ Muhammad Nasri Katman and Firawati Firawati, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Ekonomi Masyarakat,” *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam* I, no. 1 (2021), hlm. 26–41.

⁴⁶ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2013), hlm. 4.

⁴⁷ Wiamntoro Yohan, Susilowati Kekalih, and Subagyo Udin, “Financial Inclusion and Low-Income Group: A Case Study in Indonesia,” *Espacios* 41, no. 08 (2020), hlm. 26–38.

pengawasan. Hal ini memungkinkan lembaga pendidikan Islam untuk tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat hubungan sosial antara lembaga dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan umat yang holistik.

2. Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat

a. Pengertian dan Konsep

Manajemen pendidikan yang berbasis masyarakat memposisikan masyarakat sebagai pihak utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan.⁴⁸ Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, pendekatan ini mengakomodasi nilai-nilai, kebutuhan, serta aspirasi umat Islam, dan mendorong keterlibatan aktif mereka dalam proses pengelolaan serta pengembangan lembaga pendidikan. Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) dipahami dalam berbagai cara, namun pada dasarnya memiliki inti yang serupa, yakni merupakan suatu bentuk pendidikan yang diarahkan untuk mendorong pembangunan masyarakat (*community development*) dengan menitikberatkan pada proses rekayasa sosial.⁴⁹

Dalam konsep pendidikan berbasis masyarakat, secara implisit terkandung pemahaman mengenai makna "masyarakat" itu sendiri. Istilah ini kerap digunakan untuk membedakannya dari bentuk pendidikan yang

⁴⁸ Ruslan Ruslan, "Model Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)* 2, no. 2 (2024), hlm. 87–100.

⁴⁹ Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 88.

diselenggarakan oleh negara atau dikenal sebagai *state based education*.⁵⁰

Meskipun terdapat beragam definisi mengenai masyarakat, secara umum istilah ini merujuk pada sekelompok individu yang hidup dalam suatu komunitas dan menjalin hubungan sosial yang erat satu sama lain.

Dalam pelaksanaan pendidikan, keterlibatan masyarakat memegang peranan penting sebagai unsur pendukung terbentuknya pendidikan berbasis masyarakat, sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat nyata bagi warga. Bentuk partisipasi tersebut diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memperluas keterlibatan individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam proses penyelenggaraan serta pengendalian mutu layanan pendidikan. Masyarakat dapat berfungsi sebagai sumber daya, pelaksana, sekaligus penerima manfaat hasil pendidikan. Dengan demikian, masyarakat memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat, yang mencakup perumusan dan penerapan kurikulum, pelaksanaan evaluasi, serta pengelolaan dan pendanaan yang sejalan dengan standar pendidikan nasional.⁵¹

Landasan hukum dari penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 55, yang mengatur

⁵⁰ Dean Nielsen, *Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat Di Indonesia*. Dalam Fasli Jalal & Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hlm. 97.

⁵¹ James Ronald Tambunan and Pandapotan Simatupang Amiruddin Tumanggor, *Manajemen Pendidikan*, cetakan 1 (Yogyakarta: K-Media Anggota IKAPI, 2021), hlm. 136.

secara eksplisit tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam dunia pendidikan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Masyarakat memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat, baik dalam bentuk pendidikan formal maupun nonformal, dengan menyesuaikan pada karakteristik keagamaan, kondisi sosial, dan budaya setempat demi kepentingan masyarakat itu sendiri.
- 2) Pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat meliputi pengembangan dan penerapan kurikulum, evaluasi pendidikan, serta pengelolaan dan pendanaan, yang harus sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 3) Sumber pendanaan kegiatan pendidikan berbasis masyarakat dapat berasal dari penyelenggara, partisipasi masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat berhak mendapatkan dukungan berupa bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lainnya dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah secara adil dan proporsional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana diatur pada ayat (1) hingga ayat (4) dijabarkan melalui peraturan pemerintah.

Pendidikan berbasis masyarakat (PBM) merupakan penerapan prinsip relevansi, yaitu penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dalam konsep ini, masyarakat berperan aktif sebagai subjek melalui keterlibatan pada seluruh tahap pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan komite sekolah yang beranggotakan kepala sekolah, guru senior, perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, dan siswa.⁵²

Sebagaimana diungkapkan dalam kutipan berikut:

"As process designed to enrich the lives of individuals and groups by engaging with people living within a geographical area, or sharing a common interest, to developed voluntarily a range of learning, action and reflection opportunities, determined by their personal, social, economic and political need." Artinya, Pendidikan berbasis masyarakat merupakan suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup individu maupun kelompok dengan melibatkan masyarakat yang berada dalam suatu wilayah geografis tertentu, atau yang memiliki kesamaan kepentingan. Keterlibatan ini dilakukan secara sukarela guna mengembangkan berbagai bentuk pembelajaran, tindakan, serta peluang untuk refleksi, yang ditentukan berdasarkan kebutuhan pribadi, sosial, ekonomi, dan politik mereka.⁵³

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa manajemen pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Pendekatan ini

⁵² Isnaini and Aminun P Omolu, "Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Masyarakat Di Desa Khatulistiwa Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong," *Journal of Educational Management and Islamic Leadership* 04, no. 01 (2024), hlm. 2961–9492.

⁵³ Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 137.

disesuaikan dengan nilai, kebutuhan, dan kondisi sosial budaya masyarakat, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Secara yuridis, hal ini diperkuat oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 55, yang memberikan hak sekaligus kewajiban kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan berbasis masyarakat tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga menjadi sarana rekayasa sosial melalui keterlibatan aktif dan sukarela masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.

b. Strategi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat

1) Perencanaan pendidikan berbasis masyarakat

Perencanaan berasal dari kata “rencana” yang berarti suatu rancangan atau kerangka atas sesuatu yang akan dilakukan. Dari pengertian ini, terdapat beberapa unsur penting yang dapat diidentifikasi, yaitu tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan), dan waktu (kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan). Dengan demikian, perencanaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dipersiapkan untuk dilakukan di masa mendatang.⁵⁴

Melalui perencanaan, pemanfaatan sumber daya dapat dioptimalkan, skala prioritas tersusun, koordinasi dengan pihak terkait lebih terarah, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Proses perencanaan harus berorientasi pada standar hasil

⁵⁴ Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif* (Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2005), hlm. 159.

yang terukur, sehingga penyusunannya perlu dilakukan secara akurat, tepat, dan sistematis. Dengan demikian, perencanaan pendidikan mampu mengidentifikasi tujuan lembaga sekaligus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁵⁵

Pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*) pada hakikatnya adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.⁵⁶ Artinya, masyarakat memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi masalah pendidikan, merencanakan solusi, melaksanakan program, serta mengevaluasi hasilnya.⁵⁷ Dengan begitu pendidikan berbasis masyarakat perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi setempat agar mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan ini menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap lembaga pendidikan, sehingga partisipasi dapat terjaga secara berkelanjutan. Pendidikan pun tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga wahana pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

⁵⁵ Muthahharah Thahir And Alfaiz Kanvati Amalia, *7 Poe Atikan Istimewa Membangun Karakter Unggul Melalui Model Manajemen Mutu Pendidikan* (Bandung: Indonesia Emas Group, 2023), hlm. 132.

⁵⁶ Sihombing Umberto, *Pendidikan Luar Sekolah Manajemen Strategi B* (Bandung: PD Mahkota, 2000), hlm. 36.

⁵⁷ Tri Astuti, “Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Masyarakat Desa,” *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 1, no. 2 (2017), hlm. 3784–90.

2) Pengorganisasian Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pengorganisasian adalah suatu proses untuk mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, serta sumber daya kepada seluruh anggota organisasi. Menurut Stoner, mengorganisasikan adalah proses melibatkan dua orang atau lebih untuk bekerja sama secara terstruktur dalam rangka mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Terry menjelaskan bahwa pengorganisasian adalah salah satu fungsi mendasar dalam manajemen yang dilakukan untuk mengatur seluruh sumber daya yang diperlukan, termasuk sumber daya manusia, agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan berhasil mencapai hasil yang diharapkan.⁵⁸ Pengorganisasian pendidikan berbasis masyarakat merupakan proses sistematis dalam mengatur, mengelola, dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Sudjana, pengorganisasian pendidikan berbasis masyarakat adalah bentuk pengelolaan pendidikan yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan proses pendidikan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik lokal. Proses pengorganisasian ini

⁵⁸ Haetami, *Manajemen Pendidikan Pada Era Perkembangan Teknologi* (Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, Anggota IKAPI, 2023), hlm. 29.

mencakup pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas di antara berbagai unsur masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan.⁵⁹ Pengorganisasian pendidikan berbasis masyarakat memiliki ciri khas yang menonjol, yakni bersifat fleksibel, mampu merespons kebutuhan lokal, serta menempatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai prioritas dalam setiap aspek penyelenggaraan Pendidikan.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pengorganisasian pendidikan berbasis masyarakat tidak hanya menjamin keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan dan langkah yang diambil selaras dengan kepentingan bersama. Pendekatan ini memperkuat kemandirian masyarakat dalam mengembangkan pendidikan yang relevan dan berkelanjutan.

3) Implementasi (*Actuating*) Dalam pendidikan berbasis masyarakat

Pengimplementasian (*actuating*) merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen yang bertujuan mewujudkan hasil dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Fungsi ini mencakup upaya untuk mengarahkan serta memotivasi tenaga kerja (*manpower*) sekaligus memanfaatkan fasilitas yang tersedia guna melaksanakan pekerjaan secara kolektif. Dalam konteks organisasi, *actuating* dapat

⁵⁹ H.D. Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ketiga (Bandung: Falah Production, 2018), hlm. 89.

⁶⁰ M Kamil, *Pendidikan Nonformal: Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Di Indonesia (Sebuah Pembelajaran Dari Kominkan Jepang)* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 24.

dimaknai sebagai rangkaian proses pemberian dorongan atau motivasi kepada bawahan agar mereka berkomitmen bekerja dengan kesungguhan demi tercapainya sasaran organisasi.⁶¹ Meskipun perencanaan dan pengorganisasian memiliki peran penting, keduanya tidak akan menghasilkan keluaran nyata tanpa adanya pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang.

Oleh karena itu, diperlukan penggerakan (*actuating*) untuk memunculkan tindakan. Keberhasilan penggerakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: keyakinan karyawan terhadap kemampuannya, manfaat pekerjaan bagi dirinya, tidak adanya hambatan pribadi atau tugas lain yang lebih mendesak, adanya kepercayaan yang diberikan dalam tugas tersebut, serta terciptanya hubungan kerja yang harmonis di lingkungan organisasi.⁶² Menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan pihak terkait dalam pelaksanaan serta pengembangan pendidikan agar seluruh kegiatan berlangsung efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.⁶³

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *actuating* dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah proses

⁶¹ Machali Imam and Ara Hidayat, *The Handbook Of Education Management Teoridan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah Di Indonesia*, Edisi Kedu (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 23.

⁶² Ahmad Qurtubi, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)* (surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 125-126.

⁶³ Syafaruddin, *Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Edisi Pert (Medan: Perdana Publishing, 2020), hlm 47.

menggerakkan dan mengarahkan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program pendidikan. Proses ini meliputi mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan material yang dimiliki masyarakat untuk mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pendidikan. Pendekatan ini memiliki karakteristik yang bersifat kolaboratif, berkesinambungan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

4) Pengawasan (*controlling*) Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pengawasan

Pengawasan adalah konsep yang memiliki beberapa padanan makna, seperti *controlling* (pengawasan), *monitoring* (pemantauan), dan *supervision* (penyeliaan). Dalam konteks manajemen, istilah yang umum digunakan adalah *controlling*, yang mencakup dua aspek utama, yaitu pengawasan dan pengendalian. Menurut Stoner dan Wankel, pengawasan dalam proses manajemen merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan.⁶⁴

Dalam lembaga pendidikan Islam, pengawasan berperan memantau efektivitas pembelajaran dan kinerja staf, sehingga masalah

⁶⁴ Achmad S. Ruky, *Sukses Sebagai Manajer Profesional Tanpa Gelar MM Atau MBA* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 72.

dapat terdeteksi sejak dini dan segera diperbaiki. Proses ini penting untuk menjaga mutu pendidikan serta memastikan nilai-nilai Islam diterapkan secara konsisten. Sejalan dengan pandangan Peter Drucker bahwa “apa yang tidak dapat diukur, tidak dapat dikelola,” pengawasan menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan dan keberlangsungan lembaga pendidikan.⁶⁵

Pengawasan berperan memastikan bahwa tujuan pendidikan yang disepakati antara lembaga pendidikan dan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Melalui pelaksanaan pengawasan yang tepat, berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan pendidikan dapat terdeteksi dan diatasi.⁶⁶ Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam tidak hanya berupa dukungan sumber daya, tetapi juga pengawasan terhadap program dan kebijakan agar selaras dengan kebutuhan serta nilai-nilai Islam. Melalui mekanisme seperti komite sekolah dan forum evaluasi, masyarakat turut menjaga mutu, transparansi, dan keberlanjutan pendidikan.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan lembaga Pendidikan islam

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan di Indonesia perlu ditumbuhkan melalui dorongan kemauan dan kemampuan

⁶⁵ Nur Gamar And Putriani L. Maliki, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2025), hlm. 120.

⁶⁶ Hamalik Oemar, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 131.

warga maupun kelompok masyarakat untuk terlibat secara aktif. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkontribusi. Dengan demikian, akan tercipta ide-ide yang kreatif dan imajinatif dalam memajukan dunia pendidikan. Seperti pepatah Jawa mengatakan, 'Rawi-rawi rantas, malang-malang patung', yang berarti 'Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.⁶⁷ Dengan demikian pemahaman ini menekankan pentingnya inisiatif lokal dan partisipasi aktif sebagai bagian integral dari model pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.

Konsep ini mencakup kontribusi berbagai bentuk sumber daya baik materi maupun non materi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keinginan lembaga pendidikan Islam. Dalam konteks yang lebih spesifik, partisipasi masyarakat merupakan wujud dari tanggung jawab kolektif dalam memikul beban pendidikan, di mana masyarakat berperan sebagai lembaga pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah.⁶⁸

Hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, lembaga sekolah, dan masyarakat. Sejalan dengan pandangan ini, Korten yang dikutip dalam buku *Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan* karya Suparjan, menjelaskan bahwa konsep pembangunan masyarakat pada hakikatnya mencakup beberapa aspek

⁶⁷ Normina, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan," *Ittihad* Vol. 14, no. 26 (2016), hlm. 71-85.

⁶⁸ Arif Fiandi and Darul Ilmi, "Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Kontemporer," *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 2 (2022), hlm. 206–18.

penting, yaitu fokus utama terletak pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dalam mengelola dan memanfaatkan aset yang dimiliki sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

- 1) Adanya toleransi terhadap perbedaan serta pengakuan terhadap pentingnya nilai-nilai individual.
- 2) Proses pencapaian tujuan pembangunan sosial dilaksanakan melalui pembelajaran sosial.
- 3) Budaya kelembagaan tercermin dari keberadaan organisasi yang mampu mengatur dan mengelola dirinya secara mandiri.
- 4) Jaringan koalisi dan komunikasi antara pelaku lokal, unit penerima manfaat, organisasi pelayanan daerah, pemerintah daerah, lembaga keuangan seperti bank pedesaan, dan unsur lainnya menjadi dasar dalam memperkuat pengawasan lokal, dengan bertumpu pada kapasitas masyarakat untuk mengelola pembangunan secara efektif.⁶⁹
- 5) Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut:
 - a) Pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan.
 - b) Penyediaan serta pemberian bantuan tenaga pendidik.
 - c) Penyediaan dan dukungan tenaga ahli.

⁶⁹ Lue Sudiyono, “Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembagunan Pendidikan” *Buku Karya Dosen IKIP PGRI Wates 1*, no. 1 (2022), hlm. 57.

- d) pelaksanaan program pendidikan yang belum dijalankan oleh pemerintah sebagai upaya mendukung pendidikan nasional.
- e) Kontribusi dalam bentuk dana serta bantuan lainnya.
- f) Penyediaan dan pemberian bantuan sarana pembelajaran seperti gedung dan buku.
- g) pemberian kesempatan bagi peserta didik untuk mengikuti program magang.
- h) sumbangan pemikiran serta pertimbangan strategis.
- i) dukungan dalam manajemen pendidikan.
- j) Pemberian bantuan melalui bentuk kerja sama yang konstruktif.⁷⁰

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pembangunan pendidikan karena pendidikan tidak dapat berkembang hanya melalui peran pemerintah dan lembaga sekolah semata. Masyarakat berperan sebagai pendukung utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, baik melalui dukungan moral, material, maupun sosial. Melalui partisipasi aktif masyarakat, proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang berkembang di lingkungan sekitar.⁷¹

⁷⁰ Sitti Roskina Mas, "Partisipasi Masyarakat Dan Orang Tua Dalam Penyelengaraan Pendidikan," *El-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan* VIII, no. 2 (2019), hlm. 241-894.

⁷¹ Nova Suci Lestari Pakniany, Ali Imron, and I Nyoman Sudana Degeng, "Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* 5, no. 3 (2020), hlm. 271-278.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek, antara lain penyediaan fasilitas pendidikan, dukungan finansial, tenaga, dan ide dalam perencanaan serta pelaksanaan program pendidikan. Masyarakat juga berperan sebagai pengawas dan pengontrol terhadap mutu layanan pendidikan agar tetap sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.⁷²

Melalui komite sekolah atau forum pendidikan lainnya, masyarakat dapat memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pendidikan di tingkat lokal maupun nasional. Peran aktif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap lembaga pendidikan di lingkungan mereka.⁷³

Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran komite sekolah sebagai jembatan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Komite sekolah yang berfungsi secara optimal mampu menyalurkan aspirasi masyarakat, memberikan pertimbangan terhadap kebijakan sekolah, serta mendukung pendanaan pendidikan melalui kegiatan swadaya dan kerja sama kemitraan.⁷⁴ Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai bentuk kontribusi material,

⁷² Leni Rosnani, “Peran Dan Keterlibatan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMA Tamansiswa Pematangsiantar,” *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2021), hlm. 293–300

⁷³ Devisiona et al., “Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Sarana Pendidikan,” *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology* 2, no. 2 (2024), hlm. 1–124.

⁷⁴ Azizatul Mar’ati, “Pelibatan Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan,” *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 10, no. 2 (2022), hlm. 479–84.

melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.⁷⁵

c. Elemen-elemen Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam manajemen keuangan merupakan elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). ini mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan keuangan publik. Kolaborasi masyarakat tidak hanya sebagai bentuk demokratisasi dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.⁷⁶ Adapun dimensi-dimensi keterlibatan masyarakat dalam konteks tersebut mencakup tiga tahap utama, yaitu:

1) Partisipasi dalam Perencanaan Keuangan

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja lembaga pendidikan Islam melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, yang mana mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas program, dan penetapan target pendanaan yang realistik.⁷⁷ dalam dimensi ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan mengenai prioritas

⁷⁵ Maulina Nur Afifah, Dayat Hidayat, and Safuri Musa, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Masyarakat Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tim Suara Masyarakat Dawuan Cikampek,” *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 8, no. 1 (2023), hlm. 1–15.

⁷⁶ Mardiasmo, *Akutansi Sektor Publik “Edisi Terbaru”* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), hlm. 149.

⁷⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 48.

pembangunan dan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.⁷⁸

2) Partisipasi dalam Penggalangan Dana

Bentuk partisipasi ini meliputi berbagai aktivitas pengumpulan dana seperti infak, sedekah, wakaf, dan bentuk kontribusi lainnya. Masyarakat berpartisipasi sebagai donatur sekaligus penggalangan dana yang membantu menggalang dukungan finansial dari berbagai pihak.⁷⁹ Keterlibatan masyarakat secara kolektif seperti ini tentu memberikan dukungan yang signifikan bagi keberlangsungan pembangunan lembaga pendidikan Islam. Dana yang terhimpun melalui partisipasi tersebut tidak hanya menciptakan kemandirian lembaga, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab dari masyarakat terhadap keberlangsungan pendidikan.

3) Partisipasi dalam Pengawasan dan Evaluasi

Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi penggunaan dana pendidikan serta memberikan efektivitas dan efisiensi pengelolaannya. Hal ini dapat dilakukan melalui komite sekolah, dewan pembina, atau lembaga pengawas lainnya.⁸⁰ Dengan keterlibatan tersebut, tercipta transparansi dan akuntabilitas yang

⁷⁸ Tesar Walean, Michael S. Mantiri, and Agustinus B. Pati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021), hlm. 1–9.

⁷⁹ Nursyahrul Ritonga, Achyar Zein, and Mesiono, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam Berbasis Wakaf Di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang,” *Edu Rilidia* 3, no. 2 (2019), hlm. 232–46.

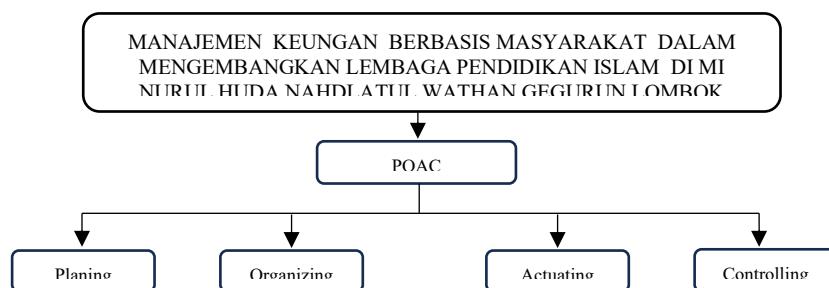
⁸⁰ Perani And Mapa P.B, *Meningkatkan Kinerja Sekolah Melalui Dana BOS: Analisis Efektivitas* (Sumedang, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara), hlm. 8.

memperkuat kepercayaan publik. Ini menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan dan kualitas lembaga pendidikan Islam.

Dengan demikian, ketiga dimensi partisipasi masyarakat dalam manajemen keuangan tersebut membentuk siklus yang saling memperkuat dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam. Manajemen keuangan berbasis masyarakat melalui integrasi perencanaan partisipatif, penggalangan dana kolektif, dan pengawasan transparan menjadi kunci strategis bagi kemandirian finansial lembaga pendidikan Islam. Model ini tidak hanya mengoptimalkan sumber daya masyarakat tetapi juga membangun rasa kepemilikan kolektif yang memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan pendidikan. Partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses manajemen keuangan menciptakan ekosistem pendidikan yang mandiri, transparan, dan *akuntabel*.

G. Kerangka Teoritis

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah dianalisis serta landasan teoritis yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini, maka penyusunan kerangka konseptual dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan temuan relevan. Oleh karena itu, kerangka konseptual penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:



Kerangka konseptual ini disusun dengan menempatkan manajemen keuangan berbasis masyarakat sebagai aspek utama yang memengaruhi perkembangan lembaga pendidikan Islam. Partisipasi masyarakat dipahami sebagai keterlibatan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan lembaga. Konsep pemberdayaan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi pendidikan diintegrasikan untuk menjelaskan bagaimana dukungan masyarakat dapat memperkuat kemandirian lembaga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dengan demikian, kerangka ini memberikan arah analitis dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan yang berbasis pada sinergi antara lembaga dan masyarakat.

H. Sistematika Pembahasan

Sitematika pembahasan penelitian ini mengikuti pedoman penulisan tugas akhir program studi magister manajemen pendidikan islam universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta, sebagai berikut

Bab I pendahuluan, bab ini mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka,, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai topik penelitian

Bab II membahas kajian teori seputar pengertian manajemen keuangan berbasis masyarakat dalam mengembangkan lembaga pendidikan islam

Bab III membahas gambaran umum MI Nurul Huda NW Gegurun Lombok Timur yang meliputi sejarah singkat madrasah, identitas madrasah, visi,misi dan tujuan madrasah, data madrasah

Bab IV Hasil Penelitian, Pembahasan, dan Keterbatasan Penelitian, pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang sudah di dilakukan mengenai manajemen keuangan berbasis masyarakat dalam mengembangkan lembaga pendidikan islam (studi di MI nurul Huda NW gegurun lombok timur

Bab V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Manajemen Keuangan Berbasis Masyarakat dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam di MI Nurul Huda Nahdlatul Wathan Gegurun Lombok Timur*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Perencanaan Manajemen Keuangan Berbasis Masyarakat

Proses perencanaan keuangan di MI Nurul Huda NW Gegurun disusun dengan prinsip partisipatif. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) dibuat melalui musyawarah antara pihak sekolah, komite, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi ini mencerminkan bentuk keterbukaan dalam menentukan arah penggunaan dana, sehingga kebutuhan madrasah dapat terpenuhi sesuai prioritas.

2. Pengorganisasian dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan

Struktur organisasi keuangan di madrasah tersusun secara jelas, melibatkan kepala madrasah, bendahara, guru, serta masyarakat. Setiap unsur memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya. Dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengelolaan dana dan pembangunan fasilitas madrasah. Pengorganisasian yang baik ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam.

3. Pelaksanaan Manajemen Keuangan Berbasis Masyarakat

Implementasi manajemen keuangan dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai sumber dana masyarakat, seperti infaq, shadaqah, dan wakaf. Masyarakat tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga berperan dalam kegiatan fisik pembangunan, penyediaan sarana-prasarana, serta perawatan lingkungan madrasah. Hal ini memperlihatkan bahwa MI Nurul Huda NW Gegurun mampu tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang mandiri dan berkelanjutan berkat partisipasi masyarakatnya.

4. Pengawasan dan Evaluasi Penggunaan Dana

Pengawasan keuangan dilakukan secara terbuka melalui keterlibatan masyarakat, komite sekolah, serta pihak internal madrasah. Keterbukaan ini memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan lembaga dan mendorong akuntabilitas. Sistem pengawasan yang transparan juga menjadi bentuk kontrol sosial untuk memastikan setiap dana digunakan sesuai kebutuhan dan tujuan pendidikan.

B. Saran

1. Bagi MI Nurul Huda Nahdlatul Wathan Gegurun

Madrasah diharapkan dapat terus memperkuat sistem administrasi dan pelaporan keuangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan perlu dilakukan agar pengelolaan dana semakin profesional dan sesuai prinsip syariah.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat tetap mempertahankan semangat gotong royong dan rasa memiliki terhadap madrasah. Partisipasi aktif baik berupa ide, tenaga, maupun dana akan menjadi penting dalam menjaga eksistensi lembaga pendidikan Islam di tengah tantangan globalisasi.

3. Bagi Pemerintah dan Pihak Terkait

Pemerintah diharapkan memberikan dukungan lebih luas terhadap lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, baik melalui bantuan kebijakan, pendanaan, maupun pelatihan manajerial, agar lembaga semacam MI Nurul Huda Nahdlatul Wathan Gegurun dapat terus berkembang secara mandiri dan inovatif.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada satu lembaga. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas kajian pada berbagai lembaga pendidikan Islam lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang model manajemen keuangan berbasis masyarakat di Indonesia.

C. Kata penutup

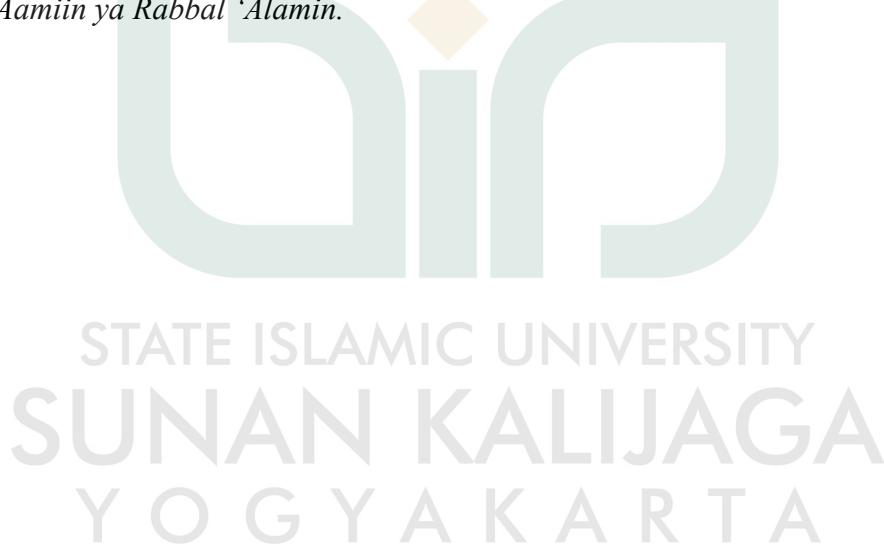
Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil,

khususnya keluarga besar MI Nurul Huda Nahdlatul Wathan Gegurun dan masyarakat Dusun Gegurun yang telah memberikan kesempatan serta data berharga dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang *Manajemen Pendidikan Islam*. Semoga temuan ini menjadi kontribusi nyata bagi lembaga pendidikan Islam lainnya dalam membangun sistem keuangan yang transparan, akuntabel, serta berbasis pada kekuatan dan kepercayaan masyarakat.

Akhirnya, semoga segala upaya dalam memperjuangkan pendidikan Islam yang unggul dan berkarakter mendapat rida serta keberkahan dari Allah Swt.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul aziz, abdun Nafi, Eva Yuniarti Utami, Dito Anugro, muchamad Arif Kurniawan, rahmawati Alwi, Dan Fuad Ahmad Riva'i. *Manajemen Pendidikan Islam: Filosofi, Konsep Dasar, Dan Implementasi Praktis.* Malang: CV. Pustaka Peradaban, 2023.
- Abdul Aziz Dkk. *Manajemen Pendidikan Islam: Filosofi, Konsep Dasar, Dan Implementasi Praktis.* Malang: CV. Pustaka Peradaban, 2022.
- Achmad S. Ruky. *Sukses Sebagai Manajer Profesional Tanpa Gelar MM Atau MBA.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Adani Asri, Nur Ainun Nisa Siregar, Sovan Liza, Rully Hidayatullah, and Harmonedi. "Pengembangan Sistem Keuangan Sekolah Berbasis Teknologi Untuk Mendukung Transformasi Society 5.0." *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024)
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024.
- Afifah, Maulina Nur, Dayat Hidayat, and Safuri Musa. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Masyarakat Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tim Suara Masyarakat Dawuan Cikampek." *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 8, no. 1 (2023).
- Ahmad Qurtubi. *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi).* Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019.
- Alexander Abe. *Perencanaan Daerah Partisipatif.* Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2018.
- Amiruddin Tumanggor, James Ronald Tambunan And Pandapotan Simatupang. *Manajemen Pendidikan.* Cetakan Pe. Yogyakarta: K-Media Anggota Ikapi, 2021.
- Anam, Khoirul. "Manajemen Keuangan Madrasah Yang Bersumber Dari Masyarakat." *At-Turats Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2019).
- Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ansell, Chris, and Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008).
- Apriansyah, Zipen. "Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Mi Nurul Huda Kota Bengkulu." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.* Jakarta: Azkia Publisher, 2012.
- Arsyad Genda, Musrayani Usman, Andi Muhammad Arif Haris, Mario Mario, Andi

- Anggraini Marabintan, Sahrul Ramadhan, Andi Fadilah Aryani, and Askar Askar. "Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Komunitas Di Desa Lasitae: Model Pemberdayaan Melalui Pendekatan Participatory Action Research (PAR)." *Kreatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 5, no. 4 (2025).
- Atoillah, Nu'man, and Muhammad Nur Hakim. "Perencanaan Keuangan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMPN 1 Bangil Pasuruan." *JMPI: Jurnal Manajemen, Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2024).
- Auliya, Auliya Fahma, Arida Salsabilah, and Muhammad Rizky. "Manajemen Keuangan Di Madrasah Aliyah Swasta Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan." *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2024).
- Ayatillah, Muhamad Fathan Lihifdzi. "Zakat Hasil Tambak Dan Tangkapan Laut (Studi Komparasi Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim Dan Yusuf Al- Qaradhawi)." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2025.
- Bahri, Husnul. "Pengelolaan Pendidikan Dan Pembelajaran Berbasis Potensi Lokal." *Nuansa* 9, no. 1 (2016).
- Bhanuwati, Indrasari Nisa, and Mochamad Chazienul Ulum. "Efektivitas Collaborative Governance Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Malang." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2025).
- Bhatt, Nitin, and Shui Yan Tang. "Delivering Microfinance in Developing Countries: Controversies and Policy Perspectives." *Policy Studies Journal* 29, no. 2 (2017).
- Creswell, John W, and Cheryl N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage publications, 2016.
- Dandono, Yustinus Rawi, and Mohammad Yamin. "Theory Of Green Management,"
- Dean Nielsen. *Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat Di Indonesia*'. *Dalam Fasli Jalal & Dedi Supriadi, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2018.
- Devisiana, Leiria Meisyani, Dinus Magay, and Riniwati. "Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Sarana Pendidikan." *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology* 2, no. 2 (2024).
- Dewi, Kemala, and Mawardi Mawardi. "Konsep Keadilan Dalam Distribusi Kekayaan:: Perspektif Ekonomi Syariah Kontemporer." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025).
- Dwiyama, Fajri, Adriani Adriani, Ismia Ismia, and Riska Oktafiana. "Manajemen Humas: Membangun Peran Masyarakat Pada Lembaga Pendidikan." *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2020).
- Fahlevvi, Mohammad Rezza, Kadek Agus Prasdya Indra Kusuma, and Muhammad Wahyu Anugerah. "Integrasi Teknologi Digital Dalam Pengawasan Internal

- Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar.” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2025).
- Faqih, Ahmad Abdullah, M Sobiri, Hani’atul Khoiroh, and Mohammad Makinuddin. “Strategi Pengembangan Bahasa Arab Untuk Mendukung Pendidikan Islam Moderat Di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.” *Miyah: Jurnal Studi Islam* 22, no. 01 (2026).
- Fatma Sari, Iswantir M, and Susanda Febriani. “Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di SMAN 5 Payakumbuh.” *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)* 2, no. 1 (2023).
- Fiandi, Arif, and Darul Ilmi. “Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Kontemporer.” *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 2 (2022).
- Guruh Sri Susanti. “Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Mi Al Hidayah Puri Pati.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Haetami. *Manajemen Pendidikan Pada Era Perkembangan Teknologi*. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, Anggota IKAPI, 2023.
- Hamalik Oemar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 20017.
- Hanson, E.M. *Educational Administration and Organizational Behavior*. 6th ed. Boston: Pearson Education, 2021.
- Herman Zuhdi. “Perkembangan Nahdlatul Wathan: Sejarah, Struktur, Dan Dampaknya Bagi Pendidikan Islam Indonesia.” *Nagri Pustaka: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sejarah, Dan Budaya* 2, no. 2 (2024).
- Ina Elvina, S T, Tri Budi Prasetya, I’ie Suwondo, S SiT, S E Asnawi, Weli Agus Setiwan, S Kom, M M Tr, S Hartoyo, and Rudi Harun Irwansyah. *Pengelolaan Pelabuhan Dan Infrastruktur Maritim*. Cendikia Mulia Mandiri, 2025.
- Inaldi, Irani Surya Kartini, and Ida Rindaningsih. “Strategi Menyusun Manajemen Keuangan Dalam Lembaga Pendidikan Islam.” *Jurnal Kependidikan Islam* 14, no. 1 (2024).
- Indarti, Ratih Dewi, and Arisyahidin Arisyahidin. “Implementasi Enterprise Risk Management Pada Proyek-Proyek Strategis Daerah Oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar.” *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen* 13, no. 2 (2024).
- Isnaini, and Aminun P Omolu. “Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Masyarakat Di Desa Khatulistiwa Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.” *Journal of Educational Management and Islamic Leadership* 04, no. 01 (2024).
- Iwan Hermawan. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan*

- Mixed Method).* Hidayatul Quran, 2014.
- Jane Ritchie et al. *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researches*. 2nd ed. Sage Publications, 2014.
- Journal, Community Development, Paisal Manurung, Dian Anggraini Harahap, Bobby Marbun, Silvi Fatimah, Meylia Andini, and Pendidikan Berkelanjutan. “Keterlibatan Masyarakat Dalam Upaya Membangun Pendidikan Berkelanjutan” 5, no. 5 (2024).
- Kadar. “Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Masyarakat (Studi Pada Tk/Ra Di Kabupaten Kebumen).” *Disertasi*, 2020, 1–291.
- Kamil, M. *Pendidikan Nonformal: Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Di Indonesia (Sebuah Pembelajaran Dari Kominkan Jepang)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Kanvati Amalia, Muthahharah Thahir And Alfaiz. *7 Poe Atikan Istimewa Membangun Karakter Unggul Melalui Model Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Indonesia Emas Group, 2023.
- Katman, Muhammad Nasri, and Firawati Firawati. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Ekonomi Masyarakat.” *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. I (2015).
- Kelana, Muhammad Aznil, and Mohammad Rezza Fahlevvi. “Manajemen Aplikasi SIPD Di Inspektorat Provinsi Riau Dalam Perspektif George R. Terry.” *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia* 4, no. 1 (2024).
- Lalu Hamdi Usman, Syaharuddin, Fathul Maujud. “Jurnal Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2024).
- Ledgerwood, J. *The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective*. Washington, DC: World Bank Publications, 2013.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Lexy J Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 40th ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Lilleker, Darren G, and Nigel A Jackson. “Towards a More Participatory Style of Election Campaigning: The Impact of Web 2.0 on the UK 2010 General Election.” *Policy & Internet* 2, no. 3 (2010).
- M.Yunus Abu Bakar, Siti Nur Maulidiyah Munandari, and Zainia Zein. “Peran Dan Tanggung Jawab Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam.” *Journal of Student Research* 2, no. 4 (2024).
- Machali Imam and Ara Hidayat. *The Handbook Of Education Management Teoridan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah Di Indonesia*. Edisi Kedu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mar’ati, Azizatul. “Pelibatan Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan.” *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 10, no. 2 (2022).

- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2019.
- _____. *Akutansi Sektor Publik “Edisi Terbaru.”* Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.
- Maulani, Galih Abdul Fatah, and Nizar Alam Hamdani. *Strategi Manajemen Perguruan Tinggi Swasta: Menggunakan Model Strategic Flexibility Dan Learning Organization Capability*. Majalengka: PT Pusat Literasi Dunia, 2024.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. “Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, Ed. 3.” *SAGE Publications* 12, no. 13 (2014).
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *The Image Displays the Cover of the Book Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Third Edition*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Misbah, Ahmad. “Model Manajemen Keuangan Syariah Di Pesantren: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pendidikan Islam Di Era Digital.” *Nidhomiyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2024): 166–84. doi:10.38073/nidhomiyah.v5i2.1940.
- MS Syaifullah. “Manajemen Keuangan Pendidikan.” *Journal of Pedagogy* 4, no. 1 (2021)
- Muda, Lokot, Desi Irawan Lestari, Fadia Aprilia, Lenny Kartika Saragih, and Miftahussa’idah Miftahussa’idah. “Pengelolaan Manajemen Resiko Dalam Sektor Agribisnis.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 3 (2025).
- Muhajirin. “Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Partisipasi Masyarakat.” *Educational Management* 1, no. 2 (2012).
- Muhammad, Pauzi. “Keadilan Dan Pemerataan Ekonomi Melalui Konsep Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020).
- Muljawan, Asep. “Model Dan Strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam.” *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam Volume* 5, no. 1 (2020).
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mustarsyidah, Zayyini Rusyda. “Manajemen Program Kelas Unggulan Untuk Meningkatkan Daya Saing Madrasah (Studi Kasus Di MTs Negeri 1 Dan MTs Negeri 2 Ponorogo).” IAIN Ponorogo, 2022.
- Nadirah, Andi Dwi Resqi Pramana, dan Nurmalinda Zari. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian Dengan Mendeley Dan Nvivo)*. CV. Azka Pustaka, 2022.
- Nanulaitta, Deflin Tresye, Carla Tousalwa, and Stevanus Johan Gomies. “Pengukuran Efektivitas Kampanye Marketing Multi-Channel: Pendekatan Statistik Untuk Mengidentifikasi Faktor Kunci Keberhasilan.” *Jurnal Administrasi Terapan* 4, no. 1 (2025).

- Naz, Farah, Muhammad Ahmed Farooqui, and M. Ishaq Bhatti. "Sustainable Solution to Finance Education in Developing World: Education Development Bank." *JISR Management and Social Sciences & Economics* 21, no. 2 (2023).
- Normina. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan." *Ittihad* 14, no. 26 (2016).
- Nur Gamar And Putriani L. Maliki. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2025.
- Nur, Wahyuni Sri, and Fitri. "Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros." *Jurnal Dedikasi Masyarakat* 3, no. 1 (2019)
- Nurhattati Fuad. *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nurul Huda & Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Syariah "Tinjauan Teoritis Dan Praktis."* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ode Syaiful Islamy, H La. *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Olga, Lidia, and Faiq Nurraihan. "Manajemen Finansial Dalam Konteks Pendidikan." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Equilibrium* 9, no. 1 (2024).
- Pakniany, Nova Suci Lestari, Ali Imron, and I Nyoman Sudana Degeng. "Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* 5, no. 3 (2020).
- Pane, Siti Hawa Rahma Sari. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Mis Perguruan Ubudiyyah Medan." State Islamic University of North Sumatera, 2023.
- Parawansah, Siti Hanifah, and Ainur Rofiq Sofa. "Pendekatan Komprehensif Berbasis Al-Qur'an Dan Hadits Dalam Pengembangan Pendidikan Islam: Integrasi Nilai, Metode, Evaluasi, Sosio-Kultural, Dan Kompetensi Pendidik." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025)
- Perani And Mapa P.B. *Meningkatkan Kinerja Sekolah Melalui Dana BOS: Analisis Efektivitas*. Sumedang, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, n.d.
- Puspitasari, Fantika Febry, Tutik Hamidah, and Aunur Rofiq. "Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi Tafsir Al-Mizan: M. Husain Tabataba'i)." *Al-Idarah : Jurnal Kependidikan Islam* 12, no. 1 (2022)
- Puspitasari, Sindi, A. Jajang W Mahri, and Suci Aprilliani Utami. "Indeks Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2020).
- Putra Sari. "Manajemen Pendidikan Masyarakat Berbasis Nilai Pada Lembaga Pendidikan Nonformal 'Gelar Hidup' Di Desa Perampuan Lombok Barat Nusa Tenggara Barat." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Redondo, Gisela. "Leadership and Community Participation: A Literature Review."

- International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences* 5, no. 1 (2016)
- Rieckmann, Marco. *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. UNESCO publishing, 2017.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019).
- Ritonga, Nursyahrul, Achyar Zein, and Mesiono. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam Berbasis Wakaf Di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang." *Edu Riliglia* 3, no. 2 (2019).
- an Mutu Pendidikan Di SMA Tamansiswa Pematangsiantar." *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2021)
- Ruslan, Ruslan. "Model Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)* 2, no. 2 (2024).
- Sadikin, La Ode Jafar, Syukran M Mokan, Dilla Astuti Ningsi, and Nila Wahyu Wulandari. "Penggerakan (Actuating) Dalam Manajemen," 2024, 3–10.
- Saeju, Andang. *Interpreting: Teori Dan Praktik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2024.
- SAFITRI, DESI. "Pengaruh Good Corporate Governance, Whistleblowing System, Audit Internal, Dan Komite Audit Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Said, Abdullah. *Kolaborasi Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2024.
- Salma, Masyqi, Frestinata Arum Merduani, Khalimatus Sya'diyah, and Kaniati Amalia. "Implementasi Partisipatif Natural Dalam Evaluasi Program Pendidikan Di SDIT At-Taqwa." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 3, no. 2 (2024).
- Samsurijal Hasan et al. *Manajemen Keuangan*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2022.
- Sapri, Ahmad Mustanir, Monalisa Ibrahim, Andi Astinah Adnan, and Wirfandi. "Peranan Camat Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *Jurnal MODERAT* 5, no. 2 (2019).
- Setiawan, Dede, Sulaiman Abdul Aziz, and Cecep Hilman. "Pengembangan Social Dan Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat." *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* 2, no. 2 (2022).
- Setiawan, Irfan. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. Bandung: CV. Rtujuh Media Printing, 2024.
- Sihombing Umberto. *Pendidikan Luar Sekolah Manajemen Strategi B*. Bandung:

- PD Mahkota, 2011.
- Siska Yulia Weni, and Isfaiyah. "Manajemen Pembiayaan Pada Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2024).
- Siti Masitho Novita Dan M. Athoiful Fanan. "Manajemen Keuangan Di Madrasah Ibtida'iyah Tarbiyatus Syarifah Sidoarjo." *Al-Mafazi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 37–44.
- Sitti Roskina Mas. "Partisipasi Masyarakat Dan Orang Tua Dalam Penyelengaraan Pendidikan." *El-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan* VIII, no. 2 (2011)
- Sopi & Tossy Aryanto. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023.
- Subasman, Iman, and Faat Nasyiruddin. "Sistem Pendidikan Islam Dalam Membangun Karakter: Evaluasi Program Ajengan Masuk Sekolah Di Pangandaran." *Journal on Education* 6, no. 4 (2024).
- Sudiyono, Lue. "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembagunan Pendidikan. , 2022, 1Buku." *Buku Karya Dosen IKIP PGRI Wates* 1, no. 1 (2022).
- Sudjana, H.D. *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ke. Bandung: Falah Production, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sumarto, Hetifah Sj. *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipatif Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025.
- Syafaruddin. *Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Pert. Medan: Perdana Publishing, 2012.
- Syahrul Fauzi, and Nidaul Fajrin. "Peran Manajemen Pendidikan Islam Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Dan Masyarakat." *HEUTAGOGIA: Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2022).
- Tasa, M. Ridwan. "Manajemen Keuangan Dan Kualitas Pendidikan Islam: Analisis Pada Lembaga Pendidikan Islam Swasta." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 9, no. 3 (2022): 814–32.
- Tri Astuti. "Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Masyarakat Desa." *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 1, no. 2 (2017).
- Trisnawati, Septian Nur Ika. *Perencanaan Pendidikan: Dari Landasan Konseptual Ke Implementasi Sekolah*. Edisi Pert. Cv Tahta Media Group, 2025.
- Ulyani, Aap Siti, Anis Fauzi, Abdul Muin, Agus Gunawan, and Suherman Priatna. "Pandangan Islam Terhadap Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan." *Leaderia: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023).
- Walean, Tesar, Michael S. Mantiri, and Agustinus B. Pati. "Partisipasi Masyarakat

- Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021).
- Waruwu, Yaredi, Desi Rahmadani, Ella Mayasari, Imriani Idrus, and Ari Kartiko. “Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.” *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 5, no. 3 (2022)..
- Winoto, Suhadi. “Komite Sekolah/Madrasah Dan Manajemen Mutu Pendidikan.” Yogyakarta: Bildung, 2021.
- Yohan, Wiamntoro, Susilowati Kekalih, and Subagyo Udin. “Financial Inclusion and Low-Income Group: A Case Study in Indonesia.” *Espacios* 41, no. 08 (2020).
- Yuliana dkk. *MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA DIGITAL*. Sersng-banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Zainuddin Iba. *Metode Penelitian*. Purbalingga: Eureka Media Aksara: Anggota IKAPI Jawa Tengah, 2023.
- Zubaedi. *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- _____. *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2013.
- Zul Fadli et.al. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Padang: CV Gita Lentera, 2025.

